



## Kawasan Wisata Bahari di Pesisir Pantai Utara dan Selatan Provinsi Jawa Tengah: Sebuah Ulasan

### *Marine tourism areas on the north and south coasts of Central Java: a Review*

Luthfi Widiyanto<sup>1</sup>, Permata Larassari<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah 53122

\*Corresponding Author: [lthfwdnt@gmail.com](mailto:lthfwdnt@gmail.com)

Diterima: 17 Mei, Disetujui: 29 Mei 2023

#### ABSTRAK

Indonesia dikenal sebagai surga dunia bagi para wisatawan, dengan geografis yang sangat unik menjadikan sektor pariwisata di Indonesia berkembang pesat, maka dari itu pemerintah Indonesia terus menekankan pariwisata sebagai andalan sumber pendapatan nasional. Jawa Tengah memiliki karakteristik garis pantai yang berbeda baik pada pantai utara dan pantai selatan, sehingga memiliki rencana pengembangan pariwisata dalam pemanfaatan pesisirnya. Potensi objek wisata bahari dan daya tarik di Provinsi Jawa Tengah sangat beragam dan tersebar di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Wisata rekreasi berbasis alam menjadi daya tarik utama, terutama wisata bahari pantai dan laut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan kawasan wisata bahari di pesisir provinsi Jawa Tengah. Analisis pengelolaan kawasan wisata bahari memiliki beberapa parameter, yaitu: aksesibilitas, sarana dan prasarana, serta keamanan. Pengelolaan wisata bahari di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat keberlanjutan yang berbeda pada karakteristik pantai utara dan pantai selatan. Berdasarkan hasil pengelolaan tingkat kunjungan di pantai utara tertinggi yaitu Kabupaten Rembang, sedangkan tingkat kunjungan terendah yaitu Kabupaten Pati pada tahun 2020 dan untuk tahun 2021 kunjungan terendah yaitu Kabupaten Demak. Tinggi rendahnya kunjungan wisatawan di tiap Kawasan Wisata Bahari dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas, sarana dan prasarana serta keamanan. Berdasarkan hasil tingkat kunjungan di perairan selatan Jawa kunjungan tertinggi yaitu Kabupaten Purworejo tahun 2020, sedangkan tahun 2021 yaitu Kabupaten Cilacap. Untuk tingkat pengunjung terendah yaitu Kabupaten Wonogiri. Strategi pengelolaan yang dapat diberikan yaitu ketersediaan peraturan daerah mengenai wisata bahari, sarana listrik, teknik pengolahan limbah, penyerapan tenaga kerja, dan daya dukung wisata untuk kategori wisata pantai.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Wisata Bahari, Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa

#### ABSTRACT

*Indonesia is known as a world paradise for tourists, with a very unique geography that makes the tourism sector in Indonesia grow rapidly, therefore the Indonesian government continues to emphasize tourism as a mainstay of the national income source. Central Java has different coastline characteristics both on the north coast and south coast, so it has a tourism development plan in the utilization of its coast. The potential for marine tourism objects and attractions in Central Java Province is very diverse and spread across regencies/cities in Central Java. Nature-based recreational tourism is the main attraction, especially marine and beach tourism. It aims to determine the management of marine tourism areas in the coastal province of Central Java. The analysis of marine tourism area management has several parameters, namely: accessibility, facilities and infrastructure, and security. Management of marine tourism in Central Java Province shows different levels of sustainability on the characteristics of the north coast and south coast. Based on the*

*management results, the highest visit rate on the north coast is Rembang Regency, while the lowest visit rate is Pati Regency in 2020 and for 2021 the lowest visit is Demak Regency. The high and low levels of tourist visits in each Marine Tourism Area are influenced by accessibility, facilities and infrastructure and security factors. Based on the results of the visit rate in the southern waters of Java, the highest visit is Purworejo Regency in 2020, while in 2021 it will be Cilacap district. For the lowest level of visitors, namely Wonogiri Regency. Management strategies that can be given are the availability of regional regulations regarding marine tourism, electricity facilities, waste processing techniques, employment absorption, and tourism carrying capacity for the beach tourism category.*

**Keywords:** Management, Marine Tourism, North Coast and South Coast of Jawa

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri dunia mengarah kepada pembangunan industri biru atau *blue economy*, yaitu industri yang berwawasan lingkungan agar tercapai pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan berkelanjutan. Salah satu sektor industri yang dapat dikembangkan dan mendukung pembangunan industri hijau adalah sektor pariwisata yang menjadi andalan ekonomi di beberapa negara karena mampu menyerap dan menciptakan lapangan pekerjaan (Moenir, 2017). Di Indonesia, sektor pariwisata menduduki peringkat ke empat sebagai penyumbang devisa negara (Irawan, 2015), oleh karenanya pemerintah Indonesia terus menekankan pariwisata sebagai andalan sumber pendapatan nasional.

Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik garis pantai yang berbeda yaitu pantai utara dan pantai selatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki rencana pengembangan pariwisata dalam pemanfaatan pesisirnya. Potensi objek dan daya tarik di Provinsi Jawa Tengah sangat beragam dan tersebar di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Objek dan daya tarik wisata tersebut telah menarik kunjungan tidak hanya wisatawan lokal tetapi juga wisatawan luar negeri. Wisata rekreasi berbasis alam menjadi daya tarik utama, terutama wisata bahari pantai dan laut. Selain itu, peran masyarakat juga berpengaruh dalam pengelolaan kawasan

wisata bahari salah satu caranya dengan cara menjaga kebersihan objek wisata yang dikunjungi. Untuk itu, perlu adanya kesadaran seluruh pengunjung kawasan wisata bahari (Kristina *et al.*, 2020).

Dengan latar belakang di atas maka dapat ditarik tujuan dari jurnal ini untuk mengetahui pengelolaan kawasan wisata bahari di pesisir Provinsi Jawa Tengah. Hasil pembahasan dalam jurnal ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan masukan dan informasi bagi pengambil kebijakan yang terkait dengan pengembangan pengelolaan kawasan wisata bahari di pesisir Provinsi Jawa Tengah.

## ULASAN

### A. Kawasan Wisata Berbasis Pesisir

Dalam pengelolaan kawasan wisata bahari berbasis pesisir tentunya memiliki beberapa parameter penentu untuk menunjang terlaksananya kegiatan tersebut. Parameter yang dimaksud yaitu aksesibilitas, sarana dan prasarana, dan keamanan. Tiga parameter tersebut saling berkaitan dan sangat penting.

Aksesibilitas dari sebuah Kawasan wisata Bahari berbasis pesisir akan memudahkan wisatawan untuk datang ke tempat tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh (Suwanto, 1997). Aksesibilitas yang baik akan menentukan mudah atau tidaknya lokasi untuk dijangkau. Transportasi yang mudah dan banyak, jalan yang lebar dan bagus, serta sudah

tersedianya Kawasan lokasi tersebut dalam internet, sehingga memudahkan wisatawan untuk menggunakan peta *online* dalam menjangkau tempat tersebut.

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh kawasan wisata bahari berbasis pesisir menjadi parameter selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh pengelola. Sarana dan prasarana yang lengkap akan memberikan kenyamanan bagi para wisatawan. Menurut Soekadijo (2000) prasarana adalah fasilitas untuk kebutuhan masyarakat pada umumnya dan pembangunannya merupakan suatu usaha yang besar, karena itu biasanya ditangani oleh pemerintah dengan menggunakan keuangan negara. Tidak hanya ketersediaan aksesibilitas serta prasarana saja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pariwisata, sarana juga menjadi salah satu faktor dalam menentukan kemajuan suatu objek wisata. Menurut Suwanto (1997) sarana wisata dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu: sarana pokok kepariwisataan (*main tourism super structure*), restoran (*catering trades*), dan atraksi wisata (*tourist attraction*).

Keamanan menjadi parameter terakhir dan paling penting bagi pengelolaan Kawasan wisata bahari

berbasis pesisir. Wisatawan yang datang berkunjung tentunya sangat ingin keamanan mereka terjamin dan terjaga selama mereka berwisata di kawasan tersebut. Pihak pengelola harus bekerja sama dengan pihak keamanan setempat untuk menjamin keamanan kawasan wisatanya.

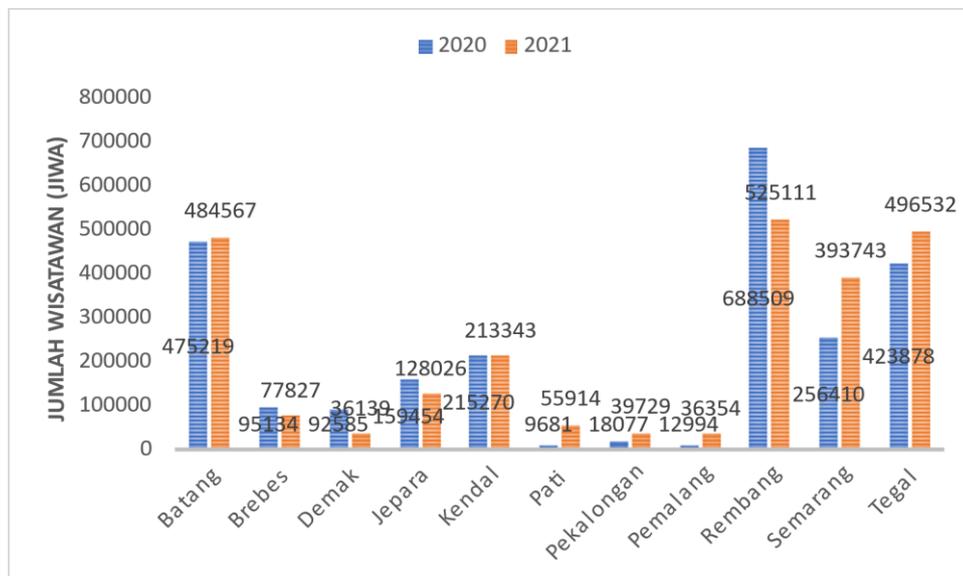
**B. Kawasan Wisata Bahari di Provinsi Jawa Tengah**

**1) Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah**

Sepuluh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah yang berada di pantai utara, otomatis kabupaten tersebut memiliki setidaknya satu kawasan pesisir yang dijadikan objek Wisata Bahari. Fungsi pesisir pantai utara Jawa Tengah digunakan sebagai pelabuhan perikanan maupun peti kemas. Salah satu pelabuhan peti kemas terbesar berada di Semarang yaitu Pelabuhan Tanjung Emas. Karakteristik pantai utara Jawa Tengah memiliki arus ombak yang tidak terlalu besar, sehingga cocok digunakan untuk pelabuhan

Berdasarkan Gambar 1. Kabupaten Rembang memiliki jumlah kunjungan wisatawan paling banyak pada tahun 2020 dan 2021. Sedangkan Kabupaten Pati memiliki kunjungan wisatawan terendah pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 kabupaten terendah kunjungan wisatawannya yaitu Kabupaten Demak

Gambar 1. Kunjungan Wisata di Pesisir Jawa

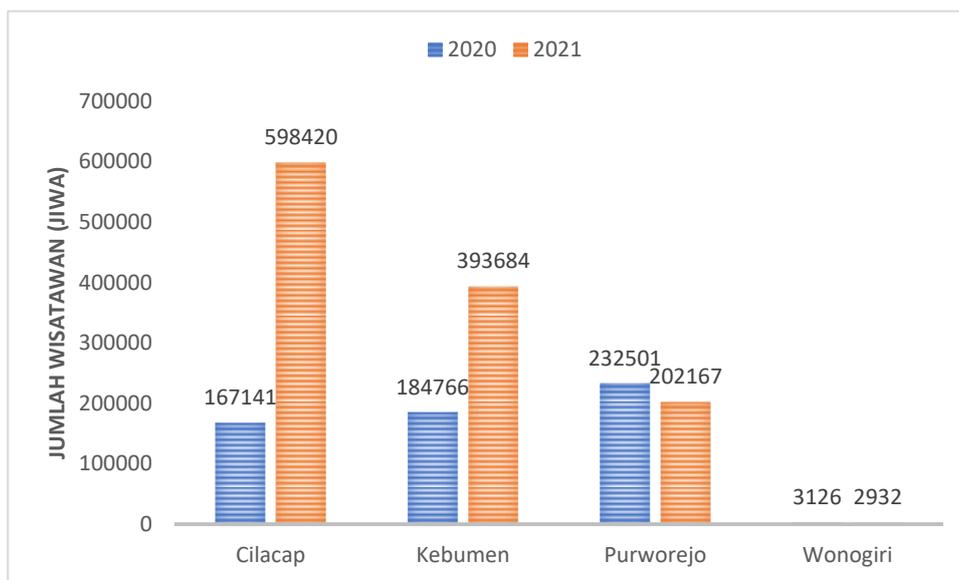


Tengah  
(Buku Statistik Pariwisata 2020-2021 Pemprov Jawa Tengah)

**2) Pesisir Selatan Provinsi Jawa Tengah**

Pantai selatan Provinsi Jawa Tengah memiliki arus yang sangat besar, maka dari itu pelabuhan di pantai selatan tidak sebanyak di pantai utara. Selain memiliki

arus yang besar, pantai di pantai selatan Jawa Tengah memiliki panorama yang lebih bagus dibanding pantai utara, didukung dengan warna air yang biru kehijau-hijauan serta banyak pantai yang memiliki pasir putih menjadikan poin tambahan sebagai objek wisata.



Gambar 2. Kunjungan Wisata diPesisir Jawa Tengah  
(Buku Statistik Pariwisata 2020-2021 Pemprov Jawa Tengah)

Pada Gambar 2 terlihat jumlah kunjungan terbanyak pada tahun 2021 berada di Kabupaten Cilacap. Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan dikarenakan oleh longgarnya kebijakan pemerintah mengenai Covid-19. Pada awal tahun 2020 merupakan awal mula munculnya wabah virus Covid-19 yang memaksa pemerintah melaksanakan kebijakan pembatasan kegiatan di luar rumah, hal tersebut juga akan mempengaruhi jumlah kunjungan ke objek wisata. Kemudian pada tahun 2021 kebijakan tersebut dilonggarkan oleh pemerintah, sehingga mempengaruhi lonjakan pada jumlah kunjungan wisatawan, sebagai contoh di Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawannya yaitu sebanyak

167141 orang, kemudian pada tahun 2021 melonjak menjadi 598420 orang.

**C. Kawasan Wisata Bahari vs Marine Protected Area (MPA)**

Definisi kawasan wisata bahari menurut Permen KP. 93 tahun 2020 adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut. Definisi Desa Wisata Bahari yang selanjutnya disebut Dewi Bahari adalah kawasan yang mempunyai potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan menjadi lokasi wisata bahari.

Kawasan konservasi laut atau *Marine Protected Area* (MPA) merupakan

sebuah kawasan yang dinyatakan sebagai wilayah perairan termasuk flora, fauna, corak budaya dan sejarah yang berkaitan, dilindungi secara hukum maupun cara lain yang efektif, untuk melindungi sebagian atau seluruh lingkungan di sekitarnya (Kelleher, 1999). Selain itu, Kawasan Konservasi Laut biasa disebut juga dengan Kawasan Konservasi Perairan. Kawasan Konservasi Perairan merupakan istilah yang digunakan dalam PP No. 60 tahun 2007, didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Dalam pengelolaannya Kawasan Wisata Bahari seringkali berasal dari kawasan konservasi laut yang dimanfaatkan dalam bentuk pariwisata, selain itu tujuan memanfaatkan kawasan konservasi laut juga sebagai edukasi terhadap wisatawan. Dengan begitu wisatawan dapat memiliki pemahaman mengenai pentingnya sumber daya laut.

#### **D. Rekomendasi Pengelolaan Wisata Bahari di Jawa Tengah**

Pengelolaan pariwisata bahari perlu memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, pengembangan wisata bahari diarahkan pada pola pengembangan ekowisata atau wisata ramah lingkungan yang mengupayakan pemanfaatan lingkungan alam bahari sekaligus juga menyelamatkan lingkungan alam bahari tersebut, pengembangan wisata bahari harus ditujukan pada upaya meningkatkan pemerataan kesempatan, pendapatan, peran serta, dan tanggung jawab masyarakat setempat yang terpadu dengan pemerintah dan dunia usaha (Prasiasa dan Hermawan, 2012). Pengelolaan wisata bahari di pesisir

pantai utara dan selatan Jawa Tengah berbeda karena adanya perbedaan letak kondisi geografis dan karakteristik topologi dari garis pantai. Pengembangan tata ruang wisata bahari di pantai utara Jawa Tengah salah satu wilayah Kabupaten Rembang mengarahkan pada keterpaduan pengembangan pariwisata regional Jawa Tengah. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam ketentuan umum rencana induk pengembangan pariwisata meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Pengembangan obyek wisata diprioritaskan berdasarkan klasifikasi keunggulan kawasan wisata, yaitu terdiri dari kawasan unggulan, andalan, pengembangan, dan kawasan potensial. Pengembangan kawasan wisata yang direncanakan untuk dikembangkan menjadi objek wisata andalan mengikuti kebijaksanaan pembangunan pada Sub Wilayah Pembangunan (SWP) merupakan sistem pengembangan kegiatan pelayanan yang bertumpu pada sumberdaya, yang mengarahkan kepada peningkatan pemerataan serta untuk lebih menyeraskan berbagai kegiatan pembangunan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan daerah.

Pengelolaan rute perjalanan wisata juga merupakan salah satu upaya untuk memberikan kemudahan bagi para wisatawan untuk mengunjungi obyek-obyek wisata secara optimal, memberikan kenyamanan perjalanan dan membuat para wisatawan nyaman dalam berwisata. Sehubungan dengan obyek pantai di wilayah Kabupaten Rembang. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan kawasan di sekitar kawasan Kabupaten Rembang menyatakan bahwa permasalahan dan ancaman yang muncul dalam pengelolaan pantai utara Jawa Tengah adalah penumpukan sampah. Sumberdaya yang ada dapat dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan wisata dengan tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan . Secara ekonomi, dapat menambah pengunjung yang datang pada kawasan pantai utara, sebagai lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Pengelolaan dengan adanya kegiatan ekowisata juga diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang di kawasan tersebut dengan tetap memperhatikan pembangunannya agar tidak berpengaruh dan menyebabkan perubahan lingkungan. Potensi sumberdaya alam di pantai utara dapat menunjang kesesuaian untuk kawasan ekowisata, yaitu potensi sumberdaya pantai dan keindahan alamnya (panorama matahari tenggelam). Pengelolaan wisata bahari mengupayakan pengembangan menjadi kawasan ekowisata menyarankan agar fasilitas di kawasan tersebut lebih ditingkatkan agar kegiatan di tempat tersebut juga semakin bervariasi, seperti misalnya peningkatan sarana untuk kegiatan wisata yaitu penyediaan perahu (*cano*), *jet ski*, atau penyediaan jasa penyewaan alat pancing. Hal ini dilakukan agar pengunjung lebih tahan untuk berlama-lama di kawasan tersebut.

Pengelolaan wisata bahari di wilayah pesisir selatan Jawa Tengah salah satunya wilayah Kabupaten Cilacap, pengelolaan yang berkelanjutan ini dapat meningkatkan pendapatan sektor wisata di Kabupaten Cilacap. Banyak potensi dari wisata bahari apabila dikelola dengan profesional, beberapa jenis pengelolaan yang dapat dikembangkan meliputi : Wisata Bisnis (*Businness Tourism*), Wisata Pantai (*Seaside Tourism*), Wisata Budaya (*Cultural Tourism*), Wisata Pemancingan (*Fishing Tourism*), Wisata Pesiar (*Cruise Tourism*), Wisata Olah Raga (*Sport Tourism*). Potensi laut di Kabupaten Cilacap memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) masyarakat Kabupaten Cilacap yang dapat memberikan kontribusi pada

pendapatan daerah Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu agar pariwisata bahari benar-benar menjadi andalan maka harus dibangun dengan strategi yang terencana dan bervisi jangka panjang. Dalam pengelolaan pariwisata bahari tersebut pemerintah daerah harus mengubah dari pendekatan sistem Birokrasi yang berbelit menjadi sistem pendekatan entrepreneurial. Pemerintah daerah dituntut untuk tanggap dan selalu bekerja keras dalam melihat peluang dan memanfaatkan peluang tersebut sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus menyiapkan sebuah regulasi/kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata bahari. Misalnya memberikan kebijakan jaminan keamanan dan kemudahan perijinan pada investor swasta. Melakukan pemetaan terhadap potensi pariwisata bahari yang dimiliki, yaitu berupa nilai, karakteristiknya, infrastruktur pendukungnya dan kemampuannya dalam menopang perekonomian. Dengan demikian dapat ditentukan pariwisata bahari mana yang harus segera dibangun dan mana yang hanya perlu di revitalisasi.

Selain itu juga perlu memetakan lingkungan yang terkait dengan pariwisata bahari baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internalnya yang perlu dipetakan adalah sejauh mana kekuatan dan kelemahan pariwisata bahari tersebut. Sedangkan lingkungan eksternal yang perlu dipetakan adalah sosial budaya, politik/kebijakan, ekonomi pasar dan kemampuan teknologi. Menyusun rencana investasi dan pembangunan atas berbagai informasi yang telah kita dapatkan dari pemetaan di atas. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan ini adalah, bahwa kita tidak hanya akan membangun sebuah pariwisata bahari saja. Namun juga perlu di perhatikan faktor pendukungnya seperti akses transportasi, telekomunikasi dan lainnya. Dengan demikian rencana

pengembangan pariwisata bahari dapat terukur dan tepat sasaran. Menciptakan kualitas SDM yang tangguh di bidang pariwisata bahari, baik *skillnya*, kemampuan dalam inovasi, adaptabilitas dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan eksternal. Budaya kerja dan pendidikan serta tingkat pemahaman terhadap permasalahan strategi dan konsep yang akan dilaksanakannya.

Selanjutnya, pengembangan wisata bahari harus mengacu pada strategi pengembangan sebagai berikut: (1) menjadikan prinsip-prinsip *ecotourism* sebagai payung pembangunan wisata bahari (2) membangun kemitraan antar pelaku yang lebih bersifat tidak struktural, namun lebih mengarah ke fungsional; (3) pengembangan diversifikasi kegiatan dan daya tarik wisata maupun produk seni budaya etnis yang dapat dijadikan daya tarik wisata; (4) mengembangkan ketertarikan dan komplementaritas antar wilayah dalam suatu sistem tata ruang pengembangan pariwisata yang terkait dengan sektor-sektor lain; (5) mendorong kerjasama bilateral dan multilateral antar negara luar dengan pemerintah daerah (pemda) setempat dan antar daerah terutama dalam pengembangan wisata bahari dan kegiatan lain termasuk keamanan dan keselamatan kegiatan wisata bahari lintas negara dan daerah (Prasiasa dan Hermawan, 2012). Dalam pelaksanaan pengembangan di daerah wisata bahari laut di pesisir utara maupun selatan Jawa Tengah beberapa telah menerapkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebagai upaya dalam pengembangan wisata bahari. Dalam prinsip pertama dapat digambarkan bahwa pengelolaan wisata bahari secara ekowisata telah merujuk pada prinsip *ecotourism* sehingga pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dapat berkembang sebagai daya tarik pengunjung.

Pengembangan wisata bahari wilayah pesisir utara dan selatan sudah banyak melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah pariwisata laut ini. Masyarakat dan pemerintah sudah berperan dalam mewujudkan pengembangan wisata bahari dengan menerapkan strategi pengembangan sehingga pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat dapat meningkat dan terwujud pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan desa wisata bahari berkelanjutan dalam perspektif ketahanan nasional layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. *United Nations For World Tourism Organization* (UNWTO) mengadopsi konsep pariwisata berkelanjutan dari konsep *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) yang dikeluarkan oleh *UN World Commission On Environment And Development* (UNWCED). Konsep pembangunan berkelanjutan tersebut terus dikembangkan, hingga pada KTT bumi tahun 2002 lahir lima kesepakatan yang erat kaitannya dengan konservasi sumber daya alam dan lingkungan, termasuk di dalamnya bidang kepariwisataan (Qodriyatun, *et al*, 2018). UNWTO mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai kegiatan pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial dan lingkungan disaat ini dan masa depan, untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, industri, lingkungan dan masyarakat lokal.

Menurut Yazdi (2012) pariwisata berkelanjutan adalah konsep terbaru yang digunakan untuk mencerminkan kebutuhan akan analisis dan pengelolaan pariwisata yang komprehensif baik sebagai bisnis maupun pengalaman. Tujuan pariwisata berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa suatu pembangunan membawa

pengalaman positif bagi masyarakat lokal, perusahaan pariwisata dan wisatawan itu sendiri. Akan tetapi, pada perkembangannya pariwisata saat ini memiliki masalah, dikarenakan adanya kecanduan pertumbuhan pariwisata yang tidak sesuai dengan tujuan keberlanjutan. Penelitian yang dilakukan (Desbiolles, 2018) menyatakan bahwa pariwisata harus dipahami dan dikelola dengan konteks keberlanjutan yang lebih luas. Selain itu, pendekatan strategis untuk transisi ke pendekatan kecukupan untuk pariwisata dan liburan sangat penting untuk menjaga keberlanjutannya.

Beberapa rekomendasi yang diberikan antara lain: mengubah organisasi pariwisata dunia PBB (UNWTO) menjadi kantor pusat untuk mobilitas berkelanjutan, menciptakan dana kekayaan pariwisata global, memupuk beragam pendekatan strategi pariwisata untuk pengembangan dan mengatur serta mengelola pariwisata untuk akuntansi yang lebih seimbang dan berkeadilan, batas ekologis, manfaat untuk manusia dan masa depan yang berkelanjutan.

#### **E. Regulasi Terkait Wisata Bahari**

Regulasi pemerintah dalam mengelola kawasan wisata bahari tercantum dalam Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jawa Tengah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 93/PERMEN-KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari. Kebijakan pengelolaan atau pengembangan wisata bahari daerah melalui kegiatan ekowisata yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah merupakan langkah yang ditempuh

pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan pariwisata di daerah yang berbasis konservasi sumberdaya alam dan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui ekowisata. Kondisi ini berkaitan erat dengan pendekatan ketahanan nasional di bidang pariwisata. Masyarakat pesisir yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan pariwisata bahari atau desa wisata bahari akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan desa dan pada akhirnya akan memberikan dampak pada ketahanan wilayah pesisir dan ketahanan nasional.

#### **F. Rekomendasi**

Pengelolaan wisata bahari yang ada dapat dikembangkan dengan berbagai rekomendasi strategi pengelolaan berkelanjutan, salah satu yang dapat dilakukan yaitu adanya ekowisata. Ekowisata merupakan aktivitas yang memadukan kegiatan konservasi dan wisata. Ekowisata (*ecotourism*) adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke tempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat (Wood, 2002). Menurut Barkauskiene & Snieska (2013) ekowisata sebagai alat pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat sosial, serta lingkungan ekonomi masa depan dan hak untuk menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi negara. Dengan demikian ekowisata dapat didefinisikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Adanya ketahanan ekonomi dan pariwisata yang bersifat

vertikal maupun horizontal tentu diperlukan dalam mencapai stabilisasi ekonomi. Perlu ditingkatkannya kolaborasi antar pemerintah pusat dengan daerah dalam hal peralihan kekuasaan, koordinasi dan tanggung jawab, antar pemerintah dengan lembaga keuangan dan moneter dalam hal pembuatan regulasi kebijakan ekonomi, antar pemerintah dengan perusahaan maupun individu penyedia jasa pariwisata dengan saling mendukung langkah inovasi baru, serta kolaborasi antar pemerintah dengan kelompok masyarakat dalam hal sosialisasi kebijakan, serta jaminan keamanan penggunaan ekonomi digital (Hojeghan & Esfangareh, 2011) melihat bahwa pemerintah perlu melakukan tiga hal yaitu: (1) Meningkatkan hukum dan kerangka peraturan; (2) memperkuat digitalisasi keuangan; dan (3) memfasilitasi transformasi elektronik dalam industri.

Konsep digitalisasi ekonomi dan sektor pariwisata yang berkesinambungan dapat menghasilkan sebuah pergeseran dari destinasi tradisional ke arah konsep yang baru dimana terdapat perubahan antara hubungan turis dengan lokasi wisata. Dengan adanya pola kolaborasi yang terorganisasi antara keseluruhan elemen *stakeholder*, maka percepatan normalisasi ekonomi di sektor pariwisata bukanlah hal yang tidak mungkin. Jika stabilitas ekonomi tercapai, maka kondisi ketahanan ekonomi nasional pun akan terwujud. Ketahanan nasional adalah kapasitas individu, komunitas atau sistem untuk beradaptasi untuk mempertahankan tingkat fungsi, struktur, dan identitas yang dapat diterima. Hidayati (2021) menyebutkan bahwa ketahanan nasional mampu menyerap tunjangan dan mengubah serta menyalurkan perubahan atau tantangan radikal serta menjaga stabilitas politik dan mencegah kekerasan. Ketahanan

nasional menunjukkan kapasitas dan legitimasi untuk mengatur populasi dan wilayahnya. Hal ini mendefinisikan ketahanan nasional sebagai kemampuan masyarakat untuk melawan dan pulih dengan mudah dan cepat dari guncangan dan menggabungkan kesiapsiagaan sipil dan kapasitas militer terkait dengan hal ketahanan ekonomi untuk membentuk satu kesatuan.

## KESIMPULAN

Analisis pengelolaan kawasan wisata bahari memiliki beberapa parameter penentu untuk menunjang terlaksananya kegiatan wisata parameter yang dimaksud yaitu aksesibilitas, sarana dan prasarana, dan keamanan. Pengelolaan wisata bahari Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tingkat keberlanjutan yang berbeda pada karakteristik pantai utara dan pantai selatan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pengelolaan tingkat kunjungan di pantai Utara tertinggi yaitu kabupaten Rembang pada tahun 2020 dan 2021. Tingkat kunjungan terendah terjadi di Kabupaten Pati pada tahun 2020 dan tahun 2021 kunjungan terendah di Kabupaten Demak. Tinggi rendahnya kunjungan wisatawan di tiap Kawasan Wisata Bahari dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas, sarana dan prasarana serta keamanan. Berdasarkan hasil tingkat kunjungan di perairan selatan Jawa kunjungan tertinggi pada tahun 2020 di Kabupaten Purworejo, tahun 2021 di Kabupaten Cilacap, dan terendah yaitu kabupaten Wonogiri.

Strategi pengelolaan yang dapat diberikan yaitu ketersediaan peraturan daerah mengenai wisata bahari, sarana listrik, teknik pengolahan limbah, penyerapan tenaga kerja, dan daya dukung wisata untuk kategori wisata pantai. Oleh karena itu, untuk mencapai pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan diperlukan peran serta masyarakat dan pemerintah untuk

keberhasilan pengelolaan wisata bahari. Pengelolaan wisata berkelanjutan dengan memadukan konsep ekowisata dan wisata bahari diyakini dapat menjadi alternatif dalam pengelolaan wisata pesisir pantai utara maupun pantai selatan Jawa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barkauskiene, K., & Snieska, V. (2013). *Ecotourism as An Integral Part of Sustainable Tourism Development. Economics & Management*, 18(3).
- Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah*.
- Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah*.
- Desbiolles-F Higgins. (2018). *Event tourism and event imposition: A critical case study from Kangaroo Island, South Australia*. *Tourism Management* 64, 73-86, 2018.
- Desbiolles-F Higgins. (2018). *Sustainable Tourism: Sustaining Tourism or Something More*. In *Tourism Management Perspectives* (Vol. 99, Issue 25 (October)). University of Chicago Press.
- Hidayati, K., Saptatia, HDN. (2021). *Pengelolaan Desa Wisata Bahari Berkelanjutan Dalam Perspektif Ketahanan Nasional*. Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 1 (9) :2722-5356
- Irawan, E. (2015). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Banyuwangi*. *Jejaring Administrasi Publik*, 7(2):757–770.
- Kelleher, G. (1999). *Guidelines for Marine Protected Areas*. International Union for the Conservation of Nature, Gland, Switzerland.
- Kristina, N. M. R., Darma, I. G. K. I. P., & Ratnaningtyas, H. (2020). *Pengelolaan Timbunan Sampah Untuk Menjaga Citra Industri Pariwisata Pada Daya Tarik Wisata Di Bali*. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25(3): 223-233.
- Moenir, H. D. (2017). *Implementasi Asean Tourism Strategic Plan 2011-2015 Dalam Kebijakan Pariwisata Indonesia Di Masa Pemerintahan Jokowi*. *Andalas Journal Of International Studies*, 6 (1): 57-78.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 *Tentang Pemberdayaan Desa wisata di Provinsi Jawa Tengah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 60 Tahun 2007. *Tentang Konservasi Sumber Daya ikan*.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 93/Permen-Kp/2020 *Tentang Desa wisata bahari*
- Prasiasa, D. & Hermawan, H. (2012). *Pengembangan Wisata Bahari di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
- Soekadijo. (2000). *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Suwanto Gamal. 1997. *Dasar-dasar Pariwisata*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Wood, M.(2002). *Ecotourism: Principles, Practices and Policies for Sustainability*. UNEP.
- Yazdi, S. K. (2012). *Renewable Energy, Nonrenewable Energy Consumption, and Economic Growth*. *American International Journal of Social Science*, 1(1), 50–56.